



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 100.3.3.1/1/1/2024
TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk tertibnya administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 34 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 34 Tahun 2023 tentang Anggaran Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Program dan Kegiatan harus sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 18 Januari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum,



Anace Nauw, S.H., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19721116 200212 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretris Daerah Provinsi Papua Barat Daya;
2. Inspektur Provinsi Papua Barat Daya;
3. Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat Daya;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 100.3.3.1/1/1/2024
TANGGAL 18 JANUARI 2024

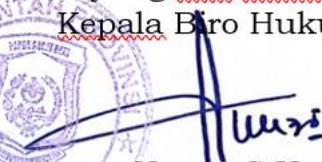
NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PAGU DPA (Rp)
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	181.713.812.524
2.	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	81.838.751.266
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	524.673.737.774
4.	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	18.893.934.683
5.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	60.060.121.106
6.	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	63.560.121.106
7.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	53.175.615.942
8.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	14.489.932.324
9.	DINAS PERHUBUNGAN	49.610.488.975
10.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	18.560.121.106
11.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	27.837.888.426
12.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12.062.789.034
13.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	34.774.065.549
14.	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	32.898.659.254
15.	SEKRETARIAT DAERAH	358.448.669.634
16.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT DAYA	26.094.881.193

17.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.451.343.193
18.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	35.653.032.243
19.	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DANASET DAERAH	324.813.506.271
20.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	15.689.932.324
21.	INSPEKTORAT DAERAH	18.063.365.306
22.	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT DAYA	32.365.829.574

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum,

Anace Nauw, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19721116 200212 2 001

